



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	4 (<i>empat</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN
Hari, Tanggal	:	Jumat, 3 April 2020
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. <i>Refocusing</i> /Realokasi Anggaran terkait Covid-19; 2. Regulasi dan Deregulasi tentang Covid-19; dan 3. Aksi Langsung Kementerian/Lembaga menghadapi Covid-19.
Hadir	:	1. Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN, Erick Thohir, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI pada hari Jumat, 3 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi seluruh langkah dan upaya Kementerian BUMN RI dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta upaya penyelamatan BUMN.
2. Komisi VI DPR RI mendukung tetap berlanjutnya 7 (*tujuh*) Program Transformasi Kementerian BUMN agar efektivitas dan efisiensi Perusahaan BUMN dalam menjalankan operasional bisnisnya guna menghasilkan laba yang lebih besar, peningkatan dividen, dan memberikan nilai tambah bagi Negara dapat tercapai sesuai dengan UU No 19, Tahun 2003 Tentang BUMN, Pasal 65 ayat (2) yaitu "*Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.*"
3. Komisi VI DPR RI dapat memahami dampak negatif Covid-19 terhadap BUMN yaitu Dividen T.A. 2020 berpotensi tidak tercapai, bahkan Dividen T.A. 2021 diproyeksikan hanya tercapai 50%, dan diharapkan Kementerian BUMN segera menstabilkan secepatnya.
4. Komisi VI DPR RI mendukung penugasan BUMN dari Presiden RI untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penanganan Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI mendorong konsolidasi kekuatan Kementerian BUMN RI untuk membantu pemerintah dan masyarakat sebagai *agent of change* dan dalam kaitannya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
6. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan kontribusi BUMN dan langkah-langkah konkrit yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yaitu energi, pangan, keuangan/perbankan, obat-obatan, alat medis, UMKM, dan lain-lain.
7. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI menyusun protokol manajemen krisis yang melampirkan skenario dampak ringan, menengah sampai terburuk apabila Pandemi Covid-19 berlangsung dalam periode yang lama untuk memitigasi resiko terhadap kesehatan dan perekonomian nasional.
8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 3 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

ARIA BIMA
A-189